

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pilih bagi warga binaan di Rutan Bangkalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Latar belakang permasalahan adalah bagaimana memastikan hak pilih warga binaan dapat terpenuhi meskipun mereka berada dalam situasi terbatas. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pengurus Rutan Bangkalan dalam memfasilitasi hak pilih, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan petugas Rutan dan warga binaan, serta studi dokumen terkait peraturan pemilu. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai proses verifikasi identitas, sosialisasi pemilu, dan persiapan teknis yang dilakukan oleh pengurus Rutan. Selain itu, analisis dokumen membantu memahami kerangka hukum dan peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilu bagi warga binaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengurus Rutan Bangkalan telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk memenuhi hak pilih warga binaan, termasuk pengumpulan dan verifikasi NIK, sosialisasi pemilu melalui poster dan brosur, serta koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya surat suara dan kesulitan dalam verifikasi identitas. Meskipun demikian, solusi seperti meminta surat suara tambahan dari TPS sekitar dan melakukan verifikasi identitas secara intensif telah diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Partisipasi warga binaan dalam pemilu di Rutan Bangkalan menunjukkan antusiasme yang tinggi, mencerminkan keberhasilan upaya sosialisasi dan pemberian informasi yang dilakukan oleh pengurus Rutan.

Kata Kunci: Pemenuhan hak pilih – Pemilu 2024 – Rutan Bangkalan

ABSTRACT

This research focuses on the fulfillment of the right to vote for prisoners in Bangkalan Detention Center in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2017 concerning Elections. The background of the problem is how to ensure that the voting rights of prisoners can be fulfilled even though they are in a limited situation. The formulation of the problem raised is how efforts have been made by Bangkalan Detention Center administrators in facilitating voting rights, the obstacles faced, and the solutions applied to overcome these obstacles.

The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with detention center officers and prisoners, as well as document studies related to election regulations. Interviews were conducted to explore information about the identity verification process, election socialization, and technical preparations made by detention center administrators. In addition, document analysis helps to understand the legal framework and regulations governing the implementation of elections for prisoners.

The results of the analysis show that Bangkalan detention center administrators have made significant efforts to fulfill the voting rights of detainees, including the collection and verification of NIK, socialization of elections through posters and brochures, and coordination with the KPU and Bawaslu. The main obstacles faced were the lack of ballot papers and difficulties in identity verification. Nonetheless, solutions such as requesting additional ballots from surrounding polling stations and conducting intensive identity verification have been implemented to overcome these problems. The participation of prisoners in the elections at Bangkalan Detention Center showed high enthusiasm, reflecting the success of the socialization and information provision efforts carried out by the detention center management.

Keywords: *Fulfillment of voting rights - Election 2024 - Bangkalan Detention Center*